

PARTISIPASI TOKOH MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN CIPINANG MUARA KECAMATAN JATINEGARA JAKARTA TIMUR

Adman

Universitas Pendidikan Indonesia

e-mail : adman@upi.edu

Abstract

The impact is positive development but that is the triggering increased socio-economic, certain communities also has a negative aspect, particularly a group order becomes obvious difference between the increasingly powerless and community groups increasingly marginalised. Because of the relative progress of these developments do not enjoy. This is the cause of the several perbedan marginalised because the community does not have, insight, mental attitude and competence that could address socioeconomic inequalities. If conditions allowed continuous can more memperuncing. problems Various problems will be more emerged with no can be overcome by most residents. In this matter, and community empowerment efforts are to build competence of the community especially in Jakarta, that they are able to build various competence himself and eventually be able to build community welfare.

The purpose of this research is to analyze what is the level of the community as the party participation figure whose advice is highly respected and play an important role in initiative, build idealism, spirit and firmness mental attitude and power in the control of social develop independency. Community figures as key to the success of proses pemberdayaan masyarakat kelurahan (PPMK) in economic development, physical neighborhood, and social development. Research methodology is survey. Sample used purposive sample, with the sample of the 63 people. The data collection was done with chief covered with the model scale likert being converted in the form of the percentage high, and, and low with answers were each given codes and a score (weight), a code (a be a score (weight) 3, a code (b be a score (weight) 2, a code (c be a score (weight) 1. Instrument data collection use six the indicator with value the percentage 90,48%, 76,46%, 82,81%, 80,16%, 83,77%, and 77,51% in the category of high or good. The research by the analysis score on indicators of a variable researched it can be concluded that participation community leaders on the program community development at cipinang urban districts estuary jatinegara be in the high.

Keywords: Development, Participation, Community Leaders, Welfare

Abstrak

Dampak pembangunan selain bersifat positif yaitu semakin memacu peningkatan sosial ekonomi kelompok masyarakat tertentu, juga menimbulkan aspek negatif, khususnya semakin memperjelas jurang perbedaan antara kelompok masyarakat yang semakin berdaya dan kelompok masyarakat yang semakin terpinggirkan. Karena relative tidak menikmati kemajuan dari pembangunan tersebut. Beberapa penyebab munculnya perbedaan ini adalah karena masyarakat yang terpinggirkan tersebut tidak memiliki wawasan, sikap mental, dan kompetensi yang dapat mengatasi kesenjangan sosial ekonomi. Kondisi ini apabila dibiarkan terus menerus dapat semakin memperuncing masalah. Berbagai problem akan semakin muncul tanpa dapat diatasi oleh sebagian besar warga masyarakat. Dalam kondisi inilah, maka pemberdayaan masyarakat dilakukan sebagai upaya untuk membangun kompetensi masyarakat khususnya di DKI Jakarta, agar mereka mampu membangun berbagai kompetensi dirinya dan pada akhirnya mampu membangun kesejahteraan masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana tingkat partisipasi tokoh masyarakat sebagai pihak yang sangat dihormati dan berperan penting dalam inisiatif, membangun idealisme, semangat dan

keteguhan sikap mental serta kekuatan pengendalian sosial dalam membangun keberdayaan masyarakat. Tokoh masyarakat sebagai kunci keberhasilan pada proses pemberdayaan masyarakat kelurahan (PPMK) ditinjau dari aspek bina ekonomi, bina fisik lingkungan, dan bina sosial. Metodologi penelitian adalah survei. Sampel yang digunakan purposive sampel, dengan jumlah sampel 63 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan angket tertutup dengan model skala Likert yang dikonversi dalam bentuk persentase Tinggi, Sedang, dan Rendah dengan jawaban masing-masing diberikan kode dan skor (bobot), Kode (a) diberi skor (bobot) 3, Kode (b) diberi skor (bobot) 2, Kode (c) diberi skor (bobot) 1. Alat Pengumpulan data menggunakan enam Indikator dengan nilai persentase 90,48 %, 76,46 %, 82,81 %, 80,16 (%), 83,77 %, dan 77,51 % dalam kategori tinggi atau baik. Dari hasil penelitian dengan hasil analisis skor atas indikator dari variabel yang diteliti dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur berada pada kategori tinggi.

Kata Kunci: Pembangunan, partisipasi, Tokoh Masyarakat, kesejahteraan

1. PENDAHULUAN

Data September 2017 menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,58 juta atau 10,12 % dari seluruh penduduk Indonesia. Kondisi ini berarti turun 0,52 % jika dibandingkan dengan Maret 2017 yaitu 27.77 juta orang. Nilai ini juga membaik jika dibandingkan dengan September 2015 sebesar 11,13 % dan September 2017 sebesar 10.70%. Pemerintah terus berupaya mengatasi keparahan kemiskinan ini, baik di kota maupun dipedesaan.

Pembangunan masyarakat di DKI Jakarta, selain memunculkan kebaikan-kebaikan disisi lain juga memunculkan semakin terpinggirkannya kelompok masyarakat yang tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas, seperti kaum buru Pemerintah DKI

Jakarta membuat Program Pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil khususnya bagi yang memiliki KTP Jakarta.

Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) ialah pengelolaan oleh masyarakat melalui institusi kemasyarakatan baik yang ada di Tingkat RW, dan Tingkat Kelurahan, dengan prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

Ditingkat Kelurahan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) mengacu pada UU 34/99, yang mengatur mengenai pembentukan Dewan Kelurahan yaitu dalam pasal 27 ayat 1, untuk membantu Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan, dibentuk Dewan Kelurahan.

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK)

berperan besar untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi serta meningkatkan partisipasi masyarakat baik dalam bentuk pemikiran, tenaga, maupun financial.

Pemberdayaan masyarakat dapat berupa bantuan. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yaitu dana dari Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) seperti, Bina fisik lingkungan maksimal 20 %, Bina ekonomi minimal 60%, Bina sosial maksimal 20 % dengan dana yang bersifat hibah, dan Biaya Kegiatan Lapangan (BKL) seperti dana kegiatan operasional Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) sebesar Dua puluh juta rupiah setiap anggaran tahunan.

Organisasi resmi Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) terdiri dari pelaksana program secara fungsional dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) DKI Jakarta, sebagai pendampingannya yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat /Fasilitator Kelurahan/Perguruan Tinggi. Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai Pembina Program Pemberdayaan Masyarakat (PPMK),

Asisten Kesmas Sekda Provinsi DKI Jakarta sebagai pelaksana sehari-hari. Bank DKI mengadministrasikan dana bantuan langsung kepada rekening I Dewas Kelurahan dan mengajukan alokasi kebutuhan dana ke Biro Keuangan Provinsi DKI Jakarta. Camat dan Lurah sebagai Pembina Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK). Dewan Kelurahan (Dekel) sebagai penanggung jawab PPMK wajib membentuk Unit Pengelola Keuangan Masyarakat Kelurahan (UPKMK) untuk mengelola dana bergulir Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) dan mencatat dana hibah. Organisasi di atas dibantu oleh unsur Fasilitator Kelurahan (Faskel) dan perguruan tinggi sebagai tenaga pendamping.

Sulitnya mencari pekerjaan, dan banyaknya penduduk yang berpenghasilan rendah menjadi penyebab munculnya Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam pelaksanaannya, adakalanya muncul masalah, misalnya tahun 2001 tentang penyelewengan dana PPMK di salah satu Kelurahan di Jakarta Pusat. Suatu hal menarik untuk meneliti tentang Tingkat Partisipasi Tokoh Masyarakat dalam Program

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Rawamangun Jakarta Timur.

2. LANDASAN TEORI

Partisipasi Tokoh Masyarakat

Partisipasi merupakan keikutsertaan pikiran dan emosi/perasaan seseorang/kelompok didalam suatu kondisi pemberian dukungan demi mencapai tujuan bersama. Tokoh masyarakat adalah orang-orang tertentu yang berada dalam posisi tempat konsultasi, yang dipandang bijak, dan berwawasan luas dan memiliki pengaruh yang memungkinkan orang bertindak dengan cara tertentu. Partisipasi tokoh masyarakat adalah bentuk sikap mental dan tindakan keikutsertaan dalam rangkaian kerjasama atau dalam mengambil bagian terhadap usaha mencapai tujuan bersama bersumber dari kesadaran atas hak dan kewajiban.

Pada Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan dalam meningkatkan usaha perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat yang bersangkutan. Kemampuan partisipasi masyarakat berkembang secara mandiri. Kaitan partisipasi masyarakat erat sekali, dengan

kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kemampuan masyarakat itu untuk berkembang secara mandiri.

Kajian PPMK (Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan)

Definisi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) adalah merupakan sistem dan pola proses perubahan yang dikehendaki, dan direncanakan secara konseptual untuk memberdayakan masyarakat yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat baik fisik maupun nonfisik melalui lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan, dengan menyediakan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) memberikan peran yang besar kepada masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi serta diharapkan dapat meningkatkan partisipasi Masyarakat.

Tujuan PPMK terutama adalah untuk penyediaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), untuk memperbaharui ataupun prasarana dan sarana dasar lingkungan pengembangan ekonomi produktif

dan pembukaan lapangan kerja baru serta program sosial lainnya, mengaktifkan partisipasi masyarakat untuk mengimbangi dan mensinergikan program bantuan dari Pemerintah (matching fund), menyiapkan bantuan perorangan dan keluarga melalui upaya bersama berlandaskan kemitraan yang mampu mengembangkan usaha potensial dan berbasis pada kelompok usaha kecil, serta memanfaatkan dan memberdayakan institusi yang ada di masyarakat dengan membentuk TPK-RW. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) sarannya lebih mengutamakan masyarakat yang bertempat tinggal di RT/RW kelurahan dan memiliki identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi DKI Jakarta, PPMK dapat mengidentifikasi permasalahan dan potensi masyarakat baik yang ada di RW ataupun Kelurahan. Partisipasi merupakan keikutsertaan individu dalam mental, perasaan, yang mendorong ikut serta bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan dalam suatu kegiatan. Pembangunan nasional dengan sistem Desentralisasi diharapkan dapat mengatur kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Masalah pembangunan yang perlu diperhatikan yaitu proses kemiskinan struktural secara bertahap dapat menimbulkan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Kemiskinan struktural akibat struktur sosial yang ada membuat kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas. Pemberdayaan masyarakat untuk yang memiliki KTP Jakarta, dengan menerapkan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) yang dirancang untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis "Komunitas", seperti RT, RW, Dekel dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pembentukan kognitif masyarakat merupakan salah satu sasaran pokok pemberdayaan. Dengan berpikir yang dilandasi oleh wawasan masyarakat akan berpikir lebih sehat dan produktif. Kognitif yang baik akan membentuk perilaku yang sensitif terhadap pembangunan.. PPMK merupakan Proyek Pemerintah DKI Jakarta yang mempunyai dasar hukum, sistem dan proses perubahan terencana secara konseptual. Pemberdayaan sarannya adalah aspek fisik maupun nonfisik melalui Dewan Kelurahan untuk

kesejahteraan masyarakatnya, melalui penyediaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode survei. Aspek yang diteliti adalah. Tingkat partisipasi Tokoh Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Rawamangun Pulogadung

Jakarta Timur .

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis skor, menunjukkan bahwa Tingkat partisipasi Tokoh Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rawamangun Pulogadung Jakarta Timur termasuk kategori tinggi. Hal ini dapat dilihat pada table 1 dibawah ini.

Tabel 1 Total Skor

No	Kode Indikator	Pertanyaan	Total Skor		%
			Idealnya	Real	
01	1.1	3	756	664	87,98 %
02	1.2	4	1.134	827	72,22 %
03	1.3	4	756	626	82,81 %
04	1.4	2	1.134	909	80,16 %
05	1.5	6	1.134	793	70,0%
06	1.6	6	1.134	906	80,0%
1-E-	6	32	6.048	4817	

Mengacu pada Tabel 1 di atas, dapat dijelaskan bahwa total skor yang diharapkan untuk mendapatkan peringkat/rating maksimal idealnya $63 \times 32 \times 2 = 6.048$. Adapun total skor yang diperoleh adalah 48174 atau $48174 : 6.048 \times 100 \% = 79,60\%$.

Apabila 79,60%. dikonversi ke dalam tolok ukur yang digunakan,

maka secara kualitatif variabel yang diukur dapat dikatakan termasuk ke dalam kategori tinggi atau baik. Hasil pengukuran 6 (enam) indikator, semua indikator berada pada kategori tinggi atau baik.

a. Partisipasi tokoh masyarakat dalam bentuk saran/ide pada Program Pemberdayaan

Masyarakat Kelurahan (PPMK) ditingkat Kecamatan dan Kelurahan

Solusi atas permasalahan di lingkungan Kelurahan selalu diharapkan dari PPMK. Tokoh masyarakat bentuk partisipasinya diantaranya dalam bentuk saran. Saran atau pendapat tokoh masyarakat, merupakan hasil analisisnya dengan mengacu pada aturan yang telah ditetapkan. Analisis dilakukan secara mendalam dan memerlukan kepekaan sosial yang tinggi pada masyarakat agar pemerintah DKI mengetahui permasalahannya secara jelas. Sikap partisipasi tokoh masyarakat juga terdapat didalam membuat perencanaan melalui Identifikasi program pemberdayaan masyarakat yang tepat, dan analisis permasalahan yang ada sehingga Program Pemberdayaan masyarakat Kelurahan ini benar-benar berfungsi untuk memberdayakan masyarakat. Identifikasi masalah ditetapkan sebagai langkah awal, dan selanjutnya analisis masalah ditetapkan pada sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah DKI Jakarta sehingga mampu melaksanakan pembangunan dengan terencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sikap

partisipasi tokoh masyarakat Pemerintah pada program pemberdayaan masyarakat dilakukan pada tahap identifikasi, perencanaan dan analisis masalah, sehingga dapat disimpulkan apakah program ini cukup baik dan dapat dilanjutkan atau tidak.

Partisipasi pelaksanaan secara fungsional Pemerintah DKI dapat diketahui sejauh mana potensi dan peluang yang dimiliki masyarakat dari kegiatan pemberdayaan ini, agar dapat meningkatkan dan taraf hidup masyarakat di bidang social dan ekonomi. Umumnya responden mengatakan bahwa keterlibatan tokoh masyarakat dalam PPMK mampu memotivasi masyarakat dalam bentuk kognitif, afektif dan dengan kesiapan perilaku yang mendukung kegiatan pembangunan dan membawa dampak baik bagi perkembangan masyarakat di DKI Jakarta.

b. Partisipasi Tokoh Masyarakat dalam Bentuk pemikiran pada Program PPMK

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses sosialisasi PPMK diperlukan keterampilan dan pengetahuan tentang tingkat partisipasi, misalnya: sikap saling mengerti, dan bekerjasama

yang baik dan terencana agar pencapaian program pemberdayaan masyarakat kelurahan. Fokus sasaran adalah bidang fisik, ekonomi, dan sosial dapat terlaksana. Selama proses sosialisasi diharapkan terjadi pembentukan sikap afektif yang positif pada dialog interaktif dan segenap masyarakat yang ikut berpartisipasi sehingga masyarakat dapat memahami perlunya Program Pemberdayaan masyarakat kelurahan. Tugas Dewan Kelurahan harus membimbing dengan jelas bagaimana memanfaatkannya, dan apa pentingnya aspirasi masyarakat dalam perbaikan Program Pemberdayaan masyarakat kelurahan. Sosialisasi dilakukan sesuai dengan Peranan Dewan Kelurahan di masyarakat pada program pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kualitas pemuda melalui pelatihan. Dalam aspek fisik masyarakat juga dapat memanfaatkan program untuk kepentingan publik seperti perbaikan jalan setapak, saluran air, dll. Masyarakat juga dapat memanfaatkan program tetapi juga menjadi pengawas, dan memberikan aspirasi atau saran-saran.

c. Partisipasi tokoh masyarakat

dalam bentuk materi dalam binda fisik, bina ekonomi, dan bina social pada PPMK

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dibimbing untuk terlibat didalam mengatur serta mengelola program Pemberdayaan masyarakat kelurahan melalui UPKMK dan TPK RW. Pada pemilihan UPKMK dan TPK RW, dan tokoh masyarakat setempat menjadi wakil masyarakat. Prosedurnya. Individu/kelompok mengajukan proposal dan apabila disetujui, Tim UPKMK mengelola dan memberikan dana dengan persetujuan Dewan Kelurahan. Masyarakat juga mengajukan proposal fasilitas apa yang berhak untuk mendapatkan dana bantuan langsung. Dana kegiatan yaitu Lima juta rupiah sampai Dua puluh juta rupiah.

d. Partisipasi tokoh masyarakat informal pada binda fisik, bina ekonomi, dan bina social pada PPMK

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh masyarakat informal sudah berpartisipasi dengan baik misalnya dengan membimbing dan memotivasi kegiatan bina fisik misalnya perbaiki fasilitas lingkungan, serta penyuluhan lingkungan di

Program Pemberdayaan masyarakat kelurahan.

e. Evaluasi Pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) pada tingkat Dewan Kelurahan

Semua kegiatan harus dievaluasi untuk memantau seluruh proses kegiatan. Evaluasi dilakukan agar masyarakat memahami bahwa PPMK terus berlangsung, sejalan dengan pertanggung jawaban dana pada pemerintah. Evaluasi dilakukan untuk mengawasi proses pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden menerima hasil evaluasi PPMK penuh dengan . bahwa transparansi dan sesuai dengan rencana Pemerintah dalam proyek Pembangunan nasional. Evaluasi ini dilaporkan ke walikotamadya masing-masing. Responden setelah melakukan evaluasi menyimpulkan, bahwa program sukses dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari dana berputar, dan dana begulir ditambah oleh Pemerintah DKI Jakarta pada setiap Kelurahan. Pemerintah DKI Jakarta dalam mensejahterkan masyarakat DKI Jakarta berjalan dengan baik. Beberapa fasilitas umum diperbaiki, banyaknya

masyarakat terlibat dalam PPMK, berwirausaha.

**5. PENUTUP
KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tokoh masyarakat memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat. Tokoh masyarakat berperan aktif dalam membangun, dan memberdayakan masyarakatnya, untuk meningkatkan kehidupan social ekonomi dan usaha serta taraf hidupnya.

Berbagai jenis partisipasi tokoh masyarakat itu adalah:

1. Dalam bentuk idea atau pendapat dalam Pelaksanaan secara fungsional pada Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) dengan persentase 79,60%. Hal ini termasuk dalam kategori tinggi atau baik. Tokoh masyarakat memiliki empati dan kepekaan tinggi. Demikian pula dalam mengidentifikasi potensi, ancaman, tantangan dan peluang untuk masyarakat dalam pemanfaatan program yang tepat, sehingga masyarakat dapat mengetahui

- fungsi dan manfaat program PPMK tersebut.
2. Dalam bentuk pemikiran. Nilai persentase 72,22%. Hal ini termasuk kedalam kategori tinggi. Tokoh masyarakat terbukti melakukan sosialisasi PPMK, sehingga masyarakat mengetahui dan memahami dan memanfaatkan pentingnya PPMK tersebut.
 3. Dalam bentuk materi nilai persentase mencapai 82,81%. Hal ini termasuk kategori tinggi atau baik. Tokoh masyarakat berpartisipasi mencari dana dan membangun dana dana swadaya masyarakat, sehingga masyarakat semangatnya meningkat pada bidang pembinaan aspek ekonomi.
 4. Dalam bentuk usaha nilai persentase mencapai 80,16% dalam kategori tinggi. Tokoh masyarakat memberikan sosialisasi dengan membimbing jalannya dan memberikan arahan pada masyarakat kelurahan terlebih dahulu, dan berpartisipasi memberikan tenaganya dalam perbaikan sarana lingkungan pada bina fisik, penyuluhan pada bina sosial, dan kegiatan lainnya.
 5. Dalam bentuk profesi nilai persentasenya 70% termasuk dalam kategori tinggi, Tokoh masyarakat mampu melakukan perencanaan kerja, pembimbingan .Penilaian kinerja, kemampuan berkoordinasi, kerjasama, pengawasan, manajemen dengan sistem dan melakukan pengaturan kerja yang jelas, transparan, dan akuntabel.
 6. Evaluasi mendapat nilai 80,00% dalam kategori tinggi. Tokoh masyarakat mendokumentasikan laporan-laporan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai Dewan Kelurahan. Evaluasi kegiatan PPMK terus berjalan dan dana yang diberikan oleh Pemerintah bertambah. Tahap evaluasi juga diperiksa laporannya ke walikota madya masing-masing.

SARAN

Seluruh kegiatan partisipasi tokoh masyarakat sudah baik, atau dalam kategori tinggi. Namun ada hal yang belum mencapai pada tingkat kepuasan

masyarakat, misalnya: Pada tingkat Kelurahan, petugas dan suku dinas tingkat kelurahan lainnya perlu terus berpartisipasi yang bersifat fungsional saja.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan PPMK
Jakarta : Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jakarta, 2004

Ndraha, Taliziduhu. (1987). *Pembangunan Masyarakat (Mempersiapkan Masyarakat 77nggal Landas)*. Jakarta : Bina Aksara

Nawawi, Hadari.(1990). *Metodologi Penelitian Bidang Sosia*). Yogyakarta : Gajah Mada University Press

Arikunto, Suharsimi. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta :Rineka Cipta.

Kamus Politik Pembangunan,
Yogyakarta :Yayasan Kanisius.
1970.

Sastropetro, Santoso. (1996). *Partisipasi, Persuasi, dan*

Disiplin dalam Pembangunan Nasional
Bandung :Alumni.

Sulistiyani, Teguh, ambar.(2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaa*. Bandung : Gaya Media.

Mokoginta, Lukman.(1999) *Jakarta untuk Rakyat (Pengantar Bang All Sadikin)*. Jakarta : Pustaka Sinar harapan.

Moleong, Lexy. (1975). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Soekanto, Soerjono. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Koentjaraningrat. (1990) *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : Rineka Cipta.

Hendropuspito.(1989). *Sosiologi Sistematis* Yogyakarta : Kanisius.

Jurnal Pendidikan Masyarakat Indonesia
Volume 4 Tahun III, April 2006.